

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik lintas batas merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Salah satu faktor utama dari konflik lintas batas adalah pertumbuhan demografi yang berlebihan dan kelangkaan sumber daya alam. Terdapat dua jenis konflik atas sumber daya alam, *Wars of Scarcity* dan *Wars of Abundance*. Dalam kasus ini, Ethiopia merupakan negara sumber air dengan potensi dan kuantitas yang besar. Sementara Mesir dan Sudan bergantung dengan sumber daya air yang mengalir tersebut. Menurut Zeitoun dan Warner, dalam konflik sumber daya air lintas batas, Negara hilir akan menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak air, sementara negara hulu akan menggunakan air untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan.

Sejak dibangunnya *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) pada tahun 2011, Ethiopia telah melakukan *Water Diplomacy*. Diplomasi atas air ini berfokus pada tindakan preventif. Ethiopia menerangkan serta melakukan inisiatif untuk menjaga pembangunan GERD tetap berlangsung. Upaya serta perjuangan Ethiopia dalam menjaga pembangunan GERD tidaklah mudah. Ethiopia berhadapan dengan Mesir, salah satu raksasa di Afrika serta memiliki pengaruh internasional yang kuat. Mesir bersikeras bahwa terdapat perjanjian internasional yang telah digunakan sejak tahun 1929 dan telah diperbaharui pada tahun 1959. Namun perjanjian tersebut hanya melibatkan Sudan dan Mesir dan tidak melibatkan Ethiopia serta negara-negara pesisir sungai Nil lainnya. Mesir bersikeras karena negaranya bergantung penuh pada aliran sungai Nil, khususnya sungai Nil Biru yang berasal dari Ethiopia, karena Nil Biru memberikan 86% dari seluruh air yang mengalir di sungai Nil.

Secara fungsional GERD merupakan bendungan penghasil energi listrik sehingga tidak akan menahan aliran air. Situs pembangunan GERD berlokasi sejauh 20 km dari perbatasan dengan Sudan. Ethiopia menegaskan bahwa GERD hanya berfungsi sebagai penghasil energi listrik. GERD akan menghasilkan 6000 Megawatts energi listrik untuk memberikan akses listrik bagi seluruh rakyat Ethiopia. Sampai saat ini hanya 45% rakyat Ethiopia yang memiliki akses akan

listrik. Penggunaan listrik tersebut terpusat di kota serta kawasan industri. Tidak sampai 1% rakyat Ethiopia yang tinggal dipedesaan memiliki akses listrik. Mayoritas masih menggunakan biomassa serta kayu bakar. Penggunaan bahan bakar tersebut memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Upaya diplomasi Ethiopia dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Ethiopia. Perjuangan untuk membangun Ethiopia dilakukan mulai dari Pemerintah Domestik, Kedutaan di luar negeri, hingga Diaspora Ethiopia di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar untuk diseminasi informasi terkait pembangunan GERD ke dunia internasional dan penggalangan dana untuk mendukung pembangunan GERD. *Citizen Diplomacy* juga dilakukan oleh akademisi dan rakyat Ethiopia yang melakukan berbagai upaya untuk menjalankan diplomasi publik. Pemerintah Ethiopia kerap melakukan inisiatif seperti membentuk Panel Ahli Internasional (IPOE) dan mengadakan berbagai macam *Tripartite Talks*. Salah satu pertemuan *Tripartite Talks* berhasil menghasilkan *Declaration of Principles* yang disepakati tiga negara terkait pembangunan GERD pada tahun 2015. Pemerintah Ethiopia juga turut mengakomodasi keberatan yang disampaikan oleh Mesir dan Sudan yang menginginkan adanya pihak internasional yang terlibat kedalam pembicaraan tiga arah yang akan dilakukan untuk membahas pengisian serta pengoperasian bendungan. Namun sampai sekarang upaya tersebut masih belum berhasil karena adanya ketidaksepahaman terkait keterlibatan pihak asing dalam *Tripartite Talks* tersebut.

Bagaimanapun sebuah solusi yang disetujui oleh ketiga negara harus segera ditemukan, sebelum terjadinya konflik besar yang mengarah kepada peperangan. Jika peperangan tersebut terjadi maka dampaknya akan sangat besar bagi kestabilan dunia dan skenario tersebut sangat tidak diharapkan. Penulis merasa bahwa perlunya melakukan institusionalisasi di antara ketiga negara, seperti mendirikan komisi khusus terkait dengan sungai Nil, serupa dengan CFA yang dibuat oleh *Nile Basin Initiatives* yang belum diratifikasi hingga sekarang. Jika dilakukan secara lebih intim antara ketiga negara, mungkin pembuatan komisi tersebut akan menjadi solusi terbaik. Karena komisi tersebut akan berperan sebagai pengawas bagi ketiga negara dalam melakukan pemanfaatan sungai Nil. Sehingga ketiga negara dapat membangun rasa percaya antar satu sama lain secara langsung, tanpa adanya mediator.

6.1 Saran

Mengacu pada *The Tragedy of the Commons*, Hardin menyatakan bahwa solusi dari kekacauan yang terjadi atas perebutan sumber daya adalah pengakuan atas kebutuhan. Dalam kasus ini ketiga negara harus mengakui kebutuhannya masing-masing. Mesir yang bergantung dengan aliran sungai Nil untuk kelangsungan negaranya harus berfokus menyampaikan kebutuhannya atas air, bukan justru menekankan pada penguasaan serta klaim historis. Ethiopia yang membutuhkan GERD sebagai penghasil energi listrik juga harus menyatakan bahwa GERD akan hanya digunakan untuk menghasilkan listrik, tanpa mengganggu aliran sungai Nil. Pendekatan tersebut seharusnya menjadi dasar di setiap pertemuan yang dilakukan oleh ketiga negara dalam *Tripartite Talks*. Ketidaksepahaman dapat ditengahi oleh mediator. Mediator akan berperan sangat penting dalam menghasilkan kesepakatan antara ketiga negara. Ketiga negara harus saling sepaham serta bersedia menerima masukan dari mediator dalam pembicaraan tersebut. Mediator juga harus disetujui oleh ketiga negara untuk menghindari adanya bias atau politisasi. Sehingga penulis juga mendorong salah satu ide menghadirkan mediator yang jauh dan netral. Indonesia dapat menjadi salah satu kandidat mediator karena kedekatannya dengan ketiga negara. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki posisi netral di kancah internasional. Melalui prinsip politik bebas aktif, Indonesia berpotensi menjadi mediator netral yang dapat mengakomodasi kepentingan ketiga negara.